



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Handika Pratama Yudha<sup>1)</sup>

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”. Fenomena Masalah yaitu belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Teori yang digunakan teori Implementasi Kebijakan (Edward III), yang terdiri dari 4 dimensi : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif interaktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: Wawancara mendalam, Observasi, dan Studi Pustaka. Informan terdiri dari 9 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) optimal dilihat dari 3 (tiga) dimensi yang optimal dari 4 (empat) dimensi yang ada, yaitu : (1) Komunikasi : cukup baik, terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan di lintas sektor; (2) Sumber Daya : belum optimal, dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan adanya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa siswa; (3) Disposisi : cukup baik, dilihat dari sikap pelaksana kebijakan yang saling berkomitmen dan mendukung satu sama lain, dan; (4) Birokrasi : cukup baik, dilihat dari kejelasan struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian wewenang yang jelas. **Kata Kunci:** Implementasi, Penanganan, Putus Sekolah.

### Abstract

*The research is entitled “Implementation of Bandung City Government Policy in Handling Junior High School Dropouts”. The phenomenon of the problem is that the implementation of Bandung City Government policies in handling junior high school dropouts is not optimal. The theory used is Policy Implementation theory (Edward III), which consists of 4 dimensions: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucracy. The method used is descriptive interactive with a qualitative approach. Data collection techniques through: In-depth interviews, observations, and literature studies. The informants consisted of 9 informants. The results showed that the Bandung City Government's Policy Implementation in Handling Junior High School Dropouts was optimal as seen from 3 (three) dimensions that were optimal from 4 (four) dimensions, namely: (1)*

*Communication: quite good, seen from the communication and coordination carried out across sectors; (2) Resources: not optimal, seen from the facilities and infrastructure that are less supportive and the obstacles that are still felt by some students; (3) Disposition: quite good, seen from the attitude of policy implementers who are committed and supportive of each other, and; (4) Bureaucracy: quite good, seen from the clarity of the structure, main tasks and functions and a clear division of authority.*

**Keywords:** Implementation, Treatment, School Dropout

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya program pemerintah yang ditujukan untuk pendidikan, namun angka putus sekolah masih terus meningkat. Permasalahan putus sekolah masih menjadi duri bagi pemerintah, selain itu penyebab dan solusinya masih diselidiki. Penyebab biasanya, bukan lagi masalah ekonomi yang menjadi masalah utama atau paling umum. Pemerintah seharusnya dapat merenungkan pada permasalahan yang menjadi penyebab pada putus sekolah, menggali lebih dalam dan melakukan analisis yang lebih rinci. Sebab, pemerintah dan lembaga lainnya memberikan beasiswa yang hanya mendukung isu-isu ekonomi dan kurang menekan kepada isu-isu lainnya.

Meninjau beberapa peraturan yang telah ditetapkan, pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, penyelenggaraan pendidikan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai ketentuan umum, dasar, fungsi, dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar, Pasal 3 Ayat (2) mengatur bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan formal meliputi SD, MI, SMP, MTS dan bentuk lainnya yang sederajat. Meskipun dalam penyelenggaraan sistem pendidikan telah diatur oleh pemerintah, namun terkadang penerapan kebijakan tersebut kurang memadai.

Putus sekolah adalah keadaan di mana seorang anak

berhenti ataupun tidak melanjutkan pendidikannya sebelum mencapai jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, karena biaya pendidikan yang terus meningkat. Ada juga berbagai pengeluaran lainnya seperti : buku, seragam, kegiatan ekstrakurikuler, dll. Program pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena masalah keuangan. Selain itu, salah satu penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meresponsnya dengan cara mengeluarkan kebijakan dan peraturan. Dalam pembukaan UUD 1945, sudah jelas disebutkan “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang artinya penyelenggaraan pada pendidikan merupakan permasalahan yang serius, dan lebih tepatnya dituangkan pada Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Negara wajib mengatur dan melaksanakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penguatan Pendidikan Karakter mendorong terlaksananya pendidikan karakter di sekolah dan melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pada 4 Perpres tentang inklusi sosial, ini membuka mata kita terhadap kenyataan bahwa pada penyelenggaraan pendidikan wajib bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tanpa terkecuali.

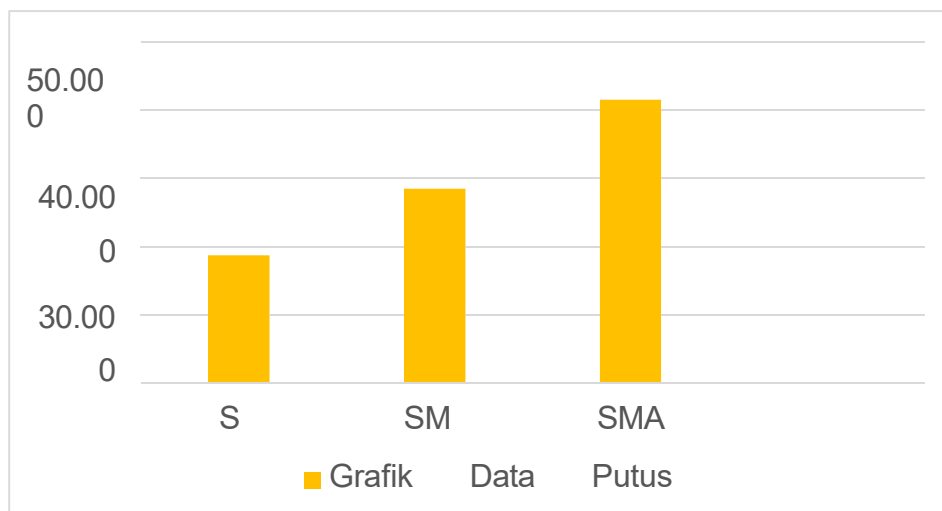
Grafik 1.1. Angka Putus Sekolah SMP



Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2024

Berdasarkan grafik di atas, pada beberapa tahun terakhir angka putus sekolah mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2015 secara signifikan, sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Selain itu, menurut Website Resmi Kota Bandung (2024), Kota Bandung merupakan kota terbesar di Jawa Barat dan Kota terbesar keempat di 5 Indonesia setelah Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Medan.

Grafik 1.2. Data Anak Putus Sekolah Kota Bandung Tahun 2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2022

Berdasarkan grafik di atas, adapun data Dinas

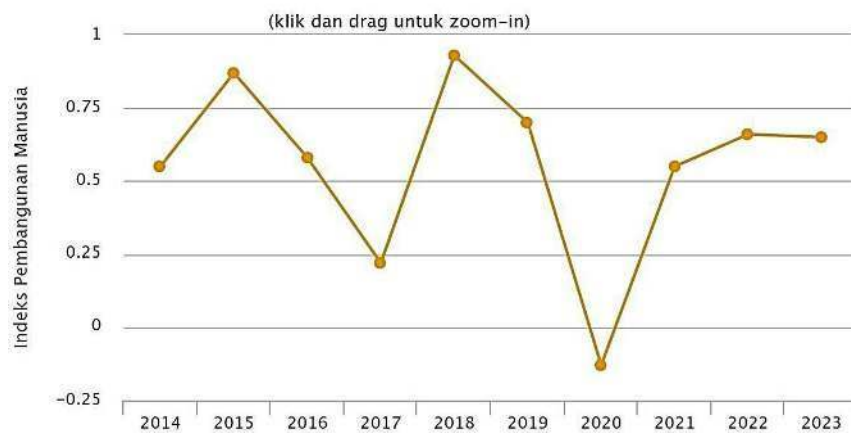
Pendidikan Kota Bandung (2023) menunjukkan antara tahun 2019 hingga 2022 terdapat 117 anak yang putus sekolah pada tingkat SMP. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat anak usia sekolah yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa: “pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kota di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi masalah masih tingginya angka putus sekolah. Permasalahan putus sekolah di tingkat SMP bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Bandung ikut berperan di dalam permasalahan putus sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pada urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pendidikan.

Persoalan angka putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi topik pembahasan yang menarik dan penting. Meski sudah terdapat pedoman mengenai wajib belajar, angka putus sekolah masih menjadi permasalahan. Dampak negatif putus sekolah tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, namun juga lintas komunikasi dan pemerintah daerah. Persoalan inilah penting, karena pada angka putus sekolah berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu parameter kinerja pembangunan daerah dan mewakili pengukuran indeks di beberapa bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Hal ini merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, artinya semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin buruk kondisi pendidikan di suatu daerah dan semakin tidak merata. Pada sisi lain, angka putus sekolah yang lebih rendah menunjukkan pada kondisi pendidikan yang lebih

baik dan merata.

Gambar 1.1 Pertumbuhan IPM Kota Bandung tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Bandung, 2024

IPM Kota Bandung mengalami kenaikan pada beberapa tahun kebelakang sedangkan pada tiga tahun terakhir mengalami ketidak stabilan, sehingga dalam IPM yang ada di Kota Bandung dapat berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian, sehingga perlunya implementasi yang efektif dalam meningkatkan IPM salah satunya di bidang pendidikan.

Mengingat kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang belum merata dan masih tingginya angka putus sekolah, pengembangan program sangatlah mungkin untuk dilaksanakan, permasalahan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif, serta proses penyampaian informasi komunikator ke komunikan untuk menginformasikan apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu dilaksanakan di dalam kebijakan untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai. Dalam hal ini bahwa pemerintah telah berperan dan mengkomunikasikan pelaksanaan pendidikan tinggi, sedangkan masyarakat masih mengalami keterbatasan

informasi dalam pendidikan, sehingga komunikasi implementasi kebijakan dalam penanganan anak putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum dikomunikasikan dengan baik, sehingga angka putus sekolah masih cukup tinggi; hal ini didukung oleh website bandungbergerak.id (2022) bahwa sebagian warga Kota Bandung tidak dapat melanjutkan sekolahnya, meskipun Pemerintah Kota Bandung telah mengkomunikasikan dan mendukung anak-anak di Kota Bandung untuk terus bersekolah.

## 2. Sumberdaya

Sumber Daya Manusia meliputi Sumber Daya Anggaran (SDA) dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang harus cukup dalam menerapkan kebijakan. Dalam hal ini bahwa pemerintah telah memberikan beasiswa rawan melanjutkan pendidikan kepada warga Kota Bandung, namun masih terjadinya masalah yang bukan hanya SDM tetapi SDA dan terlalu fokus pada aspek finansial dalam mengatasi putus sekolah, sedangkan masyarakat masih rendah mendukung pendidikan. Sehingga, rendahnya dukungan terhadap pendidikan berpengaruh pada melemahkan kualitas SDM Kota Bandung, hal tersebut juga didukung oleh website bandungbergerak.id (2023) Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya sehingga permasalahan tidak hanya di bidang SDA namun SDM, khususnya dalam dukungan terhadap pendidikan.

## 3. Disposisi

Disposisi dalam hal ini adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan dari pelaku kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan dan bantuan dana pendidikan, sedangkan masyarakat masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, sehingga masih terjadinya mengesampingkan faktor penyebab

lainnya seperti : masalah lingkungan dan pribadi, hal ini juga didukung oleh penelitian Fauzi, Ahmad dkk (2012) bahwa penyebab anak putus sekolah ialah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal dan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

#### 4. Birokrasi

Birokrasi dalam hal ini diciptakan dan mempunyai tujuan sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti : struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung telah memiliki struktur birokrasi yang jelas dalam menangani permasalahan yang ada sedangkan sebagian masyarakat Kota Bandung di sekitar belum merasakan layanan pendidikan secara layak, seperti banyak kursi zonasi yang diisi oleh siswa yang jauh rumahnya, sehingga masyarakat merasa belum adanya kesadaran atau kepentingan umum dalam aspek- aspek ini, hal ini didukung oleh [www.jabar.tribunnews.com](http://www.jabar.tribunnews.com). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti menggunakan tipe penelitian ini dengan maksud untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah



lembaga yang diberi wewenang terkait : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”. Pada lembaga - lembaga yang ada ini, maka didapatkan data tentang pelaksanaan kebijakan yang sudah atau sedang berjalan.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Studi Pustaka. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah, dengan analisis teori yang digunakan dari G. C. Edward III, bahwa teori ini mefokuskan pada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi merupakan faktor pertama yang diperlukan di dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif, bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan keputusan haruslah mengetahui dengan jelas apa yang seharusnya mereka lakukan. Komunikasi ini harus akurat dan dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Komunikasi diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif, serta proses penyampaian informasi komunikator ke komunikan untuk menginformasikan apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu dilaksanakan di dalam kebijakan untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai, dalam hal ini komunikasi yang terjadi adalah yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Sumber Daya Faktor kedua, merupakan instruksi pelaksanaan dapat diberikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika

para pelaksana kekurangan sumber daya yang dapat diperlukan, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif. Sumber daya yang penting mencakup personel yang cukup dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan tugas, serta informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk mengubah proposal kebijakan menjadi layanan publik yang berfungsi. Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi : Sumber Daya Anggaran (SDA) dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang harus cukup dalam menerapkan kebijakan, dalam hal ini adalah Sumber Daya pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

3. Disposisi Faktor ketiga merupakan disposisi, bahwa apabila para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap suatu kebijakan tertentu, mereka lebih cenderung untuk melaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Namun, jika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih rumit. Disposisi dalam hal ini adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik, dalam hal ini merupakan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir dalam implementasi kebijakan, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki sumber daya yang cukup, namun ketika 83 mereka masih bisa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena struktur organisasi di mana mereka beroperasi, dua karakteristik utama dari birokrasi adalah prosedur operasional standar (SOPs) dan fragmentasi. Birokrasi dalam hal ini

diciptakan dan mempunyai tujuan sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti : struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit unit organisasi dan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pada faktor pertama, komunikasi sangat penting di dalam implementasi kebijakan. Informasi tentang kebijakan haruslah sampai dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pada faktor pertama “komunikasi” dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang terjadi sudah baik dengan adanya usaha ataupun penanganan yang diberikan dari dinas setempat, sekolah maupun dari pihak lainnya, melalui : penyetaraan pendidikan, pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan, pendampingan dari pihak guru BK, dan koordinasi yang dilaksanakan di lintas sektor untuk menangani permasalahan yang ada. Selain itu adapun faktor keberhasilan dalam komunikasi ini, bahwa adanya penanganan dan koordinasi satu sama lain yang mendukung, baik dari pemerintah setempat, dinas, maupun pihak sekolah dalam penanganan anak putus sekolah, sehingga adanya pendekatan secara internal maupun eksternal dari pihak tersebut pada anak yang bersangkutan, sedangkan faktor kegagalan dalam komunikasi disini ialah masih terjadinya slowrespon dari beberapa keluarga atau pihak sekolah dalam menerima informasi yang diberikan baik dari dinas setempat maupun dari pihak sekolah yang bersangkutan pada anak tersebut.

Pada faktor kedua, sumber daya yang cukup adalah kunci dalam implementasi kebijakan, dan jika sumber daya tidak

mencukupi, implementasi kebijakan akan gagal. Sumber daya ini yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, dana dan kemampuan organisasional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pada dimensi sumber daya bahwa belum optimal dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti : melengkapi kebutuhan untuk mendukung anak yang bersangkutan untuk terus belajar, meskipun menggunakan anggaran secara pribadi guru atau pihak management sekolah sebagai bentuk kasih sayang dan motivasi yang dapat mendorong nya, selain itu masih adanya kendala yang dirasakan oleh beberapa siswa yang bersangkutan. Selain itu adapun faktor keberhasilan dalam sumber daya ini adalah kerjasama dari beragam pihak baik dari dinas, sekolah maupun pemerintah setempat untuk dapat mendorong anak dan keluarga yang bersangkutan untuk dapat tetap bersekolah dengan layak sebagaimana yang dirasakan pada anak yang lainnya, sedangkan faktor kegagalan dalam sumber daya ini yaitu : belum adanya dana khusus untuk penanganan anak putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung yang dirasakan baik dari sekolah-sekolah maupun dari anak dan keluarga dari pihak yang bersangkutan, sehingga anggaran yang dikeluarkan merupakan bentuk kasih sayang guru dan pihak sekolah dengan menggunakan dana pribadi untuk dapat mendorong anak tersebut dalam pembelajaran maupun permasalahan lainnya.

Pada faktor ketiga, dalam disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sikap positif dan komitmen yang kuat dari para pelaksana sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada dimensi ketiga yaitu “disposisi” cukup baik, dilihat dari sikap pelaksana kebijakan sangat berkomitmen dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sikap pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dengan adanya koordinasi

yang selalu terjalin dan seluruh pihak berkomitmen serta mendukung satu samalain selalu mengerakan untuk terus dapat melanjutkan pendidikan formal maupun non formal dan dukungan lainnya seperti : pendampingan dan konseling. Pengawasan yang terjadi baik, dengan monitoring dan evaluasi (monev) yang rutin dilaksanakan. Selain itu adapun faktor keberhasilan dalam disposisi ini, bahwa adanya sikap pelaksana yang saling berkomitmen dan menjadi perpanjangan tangan atau yang menjembatani dari pemerintah pusat di Kota Bandung yang mendukung satu sama lain untuk terus mengupayakan tentang program- program atau kebijakan mengenai pendidikan khususnya pada penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung dengan pendampingan, konseling, dan evaluasi yang dilaksanakan. Sedangkan yang menjadi faktor kegagalan dalam disposisi yaitu meskipun adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dinas ataupun pihak sekolah yang bersangkutan, namun masih sering terjadinya kurangnya pemahaman dari pihak keluarga tentang pentingnya pendidikan, sehingga seringkali mengesampingkan faktor penyebab lainnya seperti motivasi atau dukungan yang diberikan. Pada faktor keempat atau yang menjadi faktor terakhir ialah birokrasi yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi yang efektif dan dapat mengkoordinasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan sangat penting. Birokrasi yang tidak efektif dapat menghalangi terjadinya koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pada dimensi terakhir yaitu “birokrasi” cukup baik, dilihat dari kejelasan struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangannya jelas dalam penanganannya, selain itu SOP yang ada juga diidentifikasi pada permasalahannya terlebih dahulu dan aktif disosialisasikan serta publikasikan pada media sosial untuk menyebar luaskan

informasi agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dan informasi yang diberikan. Selain itu adapun faktor keberhasilan dalam dimensi birokrasi ini yaitu bahwa jelasnya pembagian wewenang dan tugas tanggung jawab pada penanganan anak putus sekolah ini, sehingga tidak ada tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi, adapun yang menjadi faktor kegagalan dalam birokrasi disini ialah, masih adanya perbedaan penginputan data pada anak putus sekolah tergantung pada indentifikasi atau klasifikasi yang diperlukan, serta terjadinya perbedaan SOP yang disesuaikan pada penanganan permasalahan yang ada, sehingga belum terjadinya penyamarataan langkah untuk penanganan lebih lanjut.

## **KESIMPULAN**

Pada analisis tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa cukup baik pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah dilihat dari : Komunikasi, cukup baik dengan adanya usaha ataupun penanganan yang diberikan dari dinas setempat, sekolah maupun dari pihak lainnya, melalui : penyetaraan pendidikan, pemberian-pemberian beasiswa bagi yang membutuhkan, pendampingan dari pihak guru BK, dan koordinasi yang dilaksanakan di lintas sektor untuk menangani permasalahan yang ada. Sumber daya dalam hal ini belum optimal dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung, misalnya : melengkapi kebutuhan anak yang bersangkutan untuk terus belajar menggunakan anggaran secara pribadi guru atau pihak management sekolah sebagai bentuk kasih sayang dan motivasi yang dapat mendorongnya, selain itu masih adanya kendala yang dirasakan oleh beberapa siswa yang bersangkutan. Disposisi cukup baik, dilihat dari sikap pelaksana

kebijakan sangat berkomitmen dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sikap pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dengan adanya koordinasi yang selalu terjalin dan seluruh pihak berkomitmen serta mendukung satu samalain selalu menggerakkan untuk terus dapat melanjutkan pendidikan formal maupun non formal dan dukungan lainnya seperti : pendampingan dan konseling. Pengawasan yang terjadi baik, dengan monitoring dan evaluasi (monev) yang rutin dilaksanakan. Birokrasi Struktur birokrasi cukup baik, dilihat dari kejelasan struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangannya jelas dalam penanganannya, selain itu SOP yang ada juga diidentifikasi pada permasalahannya terlebih dahulu dan aktif disosialisasikan serta publikasikan pada media sosial untuk menyebar luaskan informasi agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dan informasi yang diberikan. Selain itu adapun faktor keberhasilan dalam birokrasi yaitu adanya pembagian wewenang dan tugas tanggung jawab yang jelas dalam penanganan anak putus sekolah sehingga tidak pelimpahan wewenang yang terjadi, adapun yang menjadi faktor kegagalan bahwa terdapat perbedaan penginputan data pada anak putus sekolah tergantung pada klasifikasi yang diperlukan, dan terjadinya perbedaan SOP yang disesuaikan pada penanganan permasalahan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, N. S. (2011). Pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta : Sabda Media.
- Azizah, Nur, dkk .(2018). Analisis Efektivitas Dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 6 (1).
- Asri, Silsila. dkk. (2022). Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Harapan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat. Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, 2 (1).

- Bardach, Eugene. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Fourth Edition). University of California Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Depi, Ni Putu (2012). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Politikologi*. 3 (1).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ela, Neng, dkk, (2022). Analisis Kondisi Ruang Kelas Terhadap Jumlah Peserta Didik di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Universitas Djuanda Bogor*.
- Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Guepedia.
- Grindle. (2006). *Implementasi Kebijakan*. Berkeley, California, AS : University of California Press.
- Gita, Bimbi, dkk. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak dan Remaja Putus Sekolah di RT. 04/RW. 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. 3 (2).
- Haboddin, Muhtar. (2017). Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Transformative*. 3 (2).
- Herdiana, I. (2022). Banyak Warga Bandung Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah. <https://bandungbergerak.id/article/detail/2593/banyak-warga-bandung-tidak-bisa-melanjutkan-sekolah>.
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lennanda, Sandhopa. (2019). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Bengkulu.
- Meter, Van, dkk. (1975). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. PT. Rineka Cipta.



- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT Elek Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Bhuono Agung.
- Nugroho, R. (2008). Public Polic. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Nurgoho.R (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurul, Syifa. (2023). Strategi Pencegahan Putus Sekolah Melalui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.
- Pahlevi, I. (2012). Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Kajian, 17 (1).
- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 10 (2).
- Rizki, Meta, dkk . (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Penanganan Anak Putus Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS di Kota Malang).
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi Islam, 6 (2).
- Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah. Junal Universitas Gadjah Mada. 4 (4).
- Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi, 3 (1).
- Wahab, A. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua). Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarmo. (1998), Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Tehnik. Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Bandung : Mandarmaju.
- Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Jawa Timur :

Bayumedia.

Peraturan :

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 336 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Gratis Tahun 2010.

Dokumen :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23/MPN/KU/2009 Tentang Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan Dasar.

Laporan UNESCO Global Education Monitoring Report (2021).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kota Bandung.

Website:

<https://www.bandung.go.id>

<https://bandungkota.bps.go.id>

<https://simdik.bandung.go.id>

<https://bandungbergerak.id>

<https://jabar.tribunnews.com>



